

## TAJUK RENCANA

### Antisipasi Bencana Kekeringan

**BADAN** Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta sudah mengeluarkan peringatan kepada kita akan adanya potensi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasti peringatan ini mendasarkan pada data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Peringatan dini tersebut berdasarkan hasil pemantauan curah hujan hingga 20 September 2023 dan prakiraan peluang curah hujan 2 dasarian ke depan. Kitapun mesti melakukan berbagai antisipasi menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan ini.

Sebagaimana diberitakan koran ini kemarin, Kamis (21/9), BMKG juga merilis potensi kekeringan meteorologis dengan status siaga dan awas untuk beberapa lokasi di DIY. Disebut status siaga, jika suatu daerah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari. Selain itu prakiraan curah hujan rendah, kurang dari 20 mm/dasarian dengan peluang terjadi di atas 70 persen. Kemudian ditetapkan status awas jika suatu daerah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 61 hari dan prakiraan curah hujan rendah kurang dari 20 mm/- dasarian dengan peluang terjadi di atas 70 persen.

BMKG sudah memetakan daerah dengan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul meliputi Bambanglipuro, Kretek, Pandak dan Piyungan. Kemudian di Kabupaten Gunungkidul meliputi wilayah Nglipar, Paliyan, Panggang, Patuk, Rongkop, Semin dan Tanjung Sari. Di Kabupaten Kulonprogo meliputi wilayah Galur, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Samigaluh, Sentolo dan Wates. Sedang di Kabupaten Sleman ada di daerah Minggir, Moyudan, Prambanan dan Seyegan.

Kemudian daerah dengan status awas ada di Kabupaten Bantul meliputi Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Kasihan, Pundong, Sedayu dan Sewon. Untuk Kabupaten Gunungkidul ada di Gedangsari, Giri Subo, Karangmojo, Ngawen, Playen, Ponjong, Tepus dan Wonosari. Di Kabupaten Kulonprogo hanya

di Girimulyo sedang untuk Kabupaten Sleman tersebar di Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Kalasan, Ngemplak, Pakem, Sleman dan Turi.

Berdasar peta daerah dengan status siaga darurat kekeringan maupun dengan status awas, kiranya masyarakat perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapinya. Hal ini terkait dengan kebutuhan air untuk pribadi, untuk pertanian maupun untuk binatang ternak. Untuk kebutuhan pribadi baik untuk makan minum maupun membersihkan pakaian yang tidak diinginkan ini. Kemudian untuk keperluan misalnya untuk mengoncori tanaman pertanian sehingga tetap hidup bahkan membuah hasil. Sedang untuk binatang ternak antara lain untuk minum ataupun untuk membuat adonan pakan serta hijauan pakan ternak yang didapat dari tanaman pertanian atau rumputan, meski untuk mendapatkannya kadang harus membeli di tempat jauh.

Pendek kata, bagaimana agar air untuk berbagai kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Karena itu bagi mereka yang air di rumah tangganya melimpah jangan sampai dihambur-hamburkan dan dibuang secara percuma. Sedang yang paling pokok adalah air untuk kebutuhan hidup manusia. Bagaimana agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi, misalnya dengan memberi bantuan air kepada warga di daerah status awas. Lebih bagus lagi kalau bisa membuatkan sumur bor secara permanen daerah langganan kekeringan, sehingga bisa terus dimanfaatkan kapan saja.

Air memang kebutuhan pokok untuk hidup, baik bagi manusia, binatang, maupun tanaman. Karena itu, sudah semestinya kalau sesama manusia bisa saling membantu, yaitu manusia yang mendapat anugerah hidup di daerah tidak mengalami kekeringan membantu saudaranya sesama manusia di kawasan kekeringan. Mari kita antisipasi bersama-sama ancaman bencana kekeringan sehingga kebutuhan air di mana saja bisa terpenuhi. □-d

# Jelang Dua Dekade, Apa Kabar UU PKDRT?

## Ane Permatasari

**SEMBILANBELAS** tahun silam, tepatnya 22 September 2004 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) diundangkan. Sebuah regulasi yang mengusung semangat melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Tahun ini, undang-undang itu genap berusia 19 tahun. Seiring perjalanan implementasinya, kasus KDRT masih terus berulang. Bahkan tidak jarang menjadi siklus kekerasan yang melembaga di lingkup rumah tangga. Jelang dua dekade sejak diundangkan, kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik tak berkesudahan.

Berbagai survei yang dilakukan menunjukkan, angka KDRT masih tinggi. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 menampilkan data bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun yang sama mengungkap fakta bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Survei yang lain yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PIPA) menemukan, sepanjang Januari-Juni 2023, kasus kekerasan yang paling banyak dialami perempuan adalah KDRT. Angkanya menduduki posisi tertinggi yaitu 48,04% (7.649 kasus).

### Masalah Serius

Masih tingginya angka KDRT menandakan ada masalah serius di negara ini. Apalagi kekhawatiran angka yang bersumber dari pelaporan ini tentu tidak sebanding dengan kasus KDRT yang sebenarnya masih terjadi. Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan seperti fenomena puncak gunung es. Banyak pihak percaya bahwa jumlah yang terjadi sebenarnya, jauh lebih besar daripada yang dilaporkan.



KR-JOKO SANTOSO

mangat itu berkurang. Justru mulai banyak kasus, korban dilaporkan balik, dan malah pelaporan balik itu yang diproses dengan cepat.

Hambatan dan tantangan implementasi UU-PKDRT tidak berhenti di situ, ada sejumlah permasalahan. *Pertama*, sampai sekarang, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini sering kali menyebabkan korban enggan untuk melapor dan merasa bahwa tindak kekerasan yang dialaminya suatu aib yang tidak perlu diketahui orang lain. Mengikis rasa malu, melawan tabu, dan mendobrak

ruang privat atas anggapan bahwa KDRT tidak pantas diungkap, bukan sesuatu yang dengan mudah bisa dilakukan perempuan yang menjadi korban KDRT.

*Kedua*, dari identifikasi yang dilakukan terhadap kasus-kasus KDRT selama ini, menunjukkan masih ada modus serupa yaitu akibat pola relasi yang tidak setara. Ketergantungan ekonomi korban KDRT kepada pelaku KDRT, misalnya. *Ketiga* pasal 44 dan pasal 45 dalam undang-undang ini yang mengatur adanya delik aduan, seringkali digunakan APH untuk menyelesaikan kasus KDRT dengan cara mediasi untuk bisa mencapai perdamaian.

### Tujuan UU-PKDRT

Kita harus mengakui, tujuan UU-PKDRT adalah mewujudkan keluarga bahagia. Artinya, kesepakatan untuk memperbaharui keluarga, merajut kembali keharmonisan di dalamnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Memang, dalam kasus KDRT, tidak harus penyelesaiannya pelaku dipidana. Tapi tetap harus dipastikan bahwa perdamaianpun harus tetap menggunakan pendekatan efek jera bagi pelaku.

Sosialisasi UU-PKDRT tampaknya masih harus terus dilanjutkan. Implementasinya harus terus dikawal. Jelang usianya menuju dua dekade, masih banyak langkah yang harus diambil bangsa ini agar perempuan dan anak terlindungi sepenuhnya dari KDRT. □-d

*\* Dr Ane Permatasari, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Ketua SDGs Center UMY*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Memperkuat Informasi Pasar Pertanian

## Agus Dwi Nugroho

**HARI** Tani Nasional yang diperingati 24 September mengingatkan Bangsa Indonesia mengenai arti penting pertanian sebagai penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, dan penyedia pangan. Pertanian juga merupakan sektor yang tetap tumbuh positif selama krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19. Bahkan, harga pangan yang terkendali merupakan salah satu penyebab kestabilan ekonomi Indonesia selama perang Rusia-Ukraina.

Berkaca pada peran penting tersebut, pemerintah menginisiasi kebijakan subsidi input, bantuan alat mesin pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian, dan lainnya untuk mempercepat pembangunan pertanian. Sayangnya, kebijakan tersebut lebih banyak memprioritaskan kebutuhan dan minat konsumen daripada petani.

Akibatnya, petani lebih banyak menjadi *price taker* di pasar pertanian. Pada musim panen, harga jual produk pertanian turun drastis dan menyebabkan petani mengalami kerugian. Sedangkan pada musim paceklik, harga komoditas pertanian memang tinggi, namun petani hanya memperoleh bagian hasil terkecil.

### Literasi Digital

Kondisi tersebut disebabkan tidak tersampainya informasi produk dan harga di antara para pelaku pasar secara sempurna. Faktanya, hanya beberapa pelaku pasar menguasai informasi ini sehingga memiliki kemampuan mengatur pasar. Umumnya, hanya pedagang yang mampu menguasai informasi pasar dengan baik dan menyebabkan petani akan menyetujui berapapun harga yang ditawarkan karena tidak mengetahui harga di tingkat konsumen.

Untuk memperkuat sistem informasi pasar, ada beberapa strategi yang harus dipenuhi. Langkah *pertama*, meningkatkan literasi digital SDM pertanian. Saat ini teknologi informasi dan komu-

nikasi (TIK) telah berkembang pesat dan dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan usaha pertanian. TIK mampu menghubungkan antara petani dengan konsumen secara langsung serta membantu pengembangan jangkauan pemasaran.

Namun, petani di Indonesia umumnya berpendidikan rendah dan kurang literasi digitalnya sehingga tidak mampu menguasai TIK dengan baik. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka perlu dilakukan pelatihan secara kontinyu mengenai penggunaan TIK modern bagi petani maupun pelaku usaha pertanian lainnya.

Langkah *kedua*, membangun sistem informasi pasar yang terintegrasi. FAO telah merekomendasikan sistem informasi terdiri dari jenis dan jumlah produk dan sarana produksi, harga, permintaan dan preferensi konsumen, kredit, pergudangan, logistik dan transportasi, pemrosesan hasil, dan cuaca. Sistem ini perlu dibangun dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dari tingkat mikro (masyarakat) sampai dengan makro (pemerintah).

### Infrastruktur TIK

Masyarakat adalah pengguna sekaligus sumber informasi. Pemerintah ataupun lembaga swasta kemudian mengumpulkan, memvalidasi dan mengolah data serta menyajikannya kepada masyarakat dengan tepat waktu dan mudah diakses. Fungsi tersebut mulai dilakukan Bank Indonesia yang menyajikan data harga kebutuhan masyarakat. Namun tampaknya data ini belum banyak diketahui pelaku usaha pertanian. Langkah *ketiga*, membangun

infrastruktur jaringan TIK. Salah satu kesulitan di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur TIK karena beragamnya kondisi geografi dan topografi. Apalagi anggaran pemerintah juga pastinya terbatas untuk menyediakan infrastruktur TIK di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan swasta.

Wilayah dengan kondisi geografi dan topografi yang baik perlu diserahkan kepada swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Wilayah seperti ini biasanya dihuni banyak penduduk sehingga secara finansial akan menarik bagi pihak swasta. Sementara wilayah lain, terutama 3T, perlu menjadi fokus pemerintah untuk penyediaan infrastruktur TIK. Jenis infrastruktur TIK sewajarnya juga harus dilengkapi dengan berbagai infrastruktur transportasi dan logistik sehingga informasi tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat oleh pelaku usaha pertanian. □-d

*\* Agus Dwi Nugroho MSc, Dosen Fakultas Pertanian UGM*

# Pojok KR

Presiden minta Muhammadiyah jaga Pemilu 2024.

-- Juga semua komponen dalam masyarakat.

\*\*\*

OJK diminta blokir 800 rekening judi online.

-- Pasti tahu siapa pemilik rekening.

\*\*\*

Besok malam wayangan HUT ke-78 'KR'.

-- Ayo kita rame-rame menyaksikan!

*Berabe*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Habis-habisan Eksplorasi Alam Yogya

DIY sungguh luar biasa. Meski wilayahnya kecil, namun yang sejengkal ini bisa menunjukkan betapa Allah mencintai dengan memberikan alam yang indah. Bahkan medsos terus menerus mengeksplorasi keindahan alam DIY yang sangat indah luar biasa. Lihat dan cari di medsos : Tik Tok, Instagram, youtube akan banyak sekali keindahan yang dibalut dengan wisata kuliner, wisata alam ataupun wisata modern.

Dan keindahan itu sangat luar biasa merata. Hanya bagaimana memenej, mengelola dan melestarikannya. Hal ini tampak dari hadirnya resto, café, hotel, arena bermain yang memanfaatkan keindahan alam DIY.

Mulai dari sepanjang Pantai Gunungkidul, Pantai Selatan Bantul hingga Kulonprogo. Belum lagi yang dilakukan para investor yang mengelola alam indah di kaki Merapi ataupun alam pedesaan di seluruh DIY. Karena itu tidak aneh di DIY ini, café atau resto tersebar hingga ke pelosok pedesaan.

Mungkin yang menikmati hanya sebagian kecil warga. Tetapi mungkin, ini pula yang membuat warga bahagia dan tampak *ad-hem ayem*. Sekalipun berdiam di provinsi termiskin. Karena warganya mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, wilayahnya *gemah ripah loh jinawi*. □-d

*\* Yasin, Wonokromo Pleret Bantul*

## Kedaulatan Rakyat

**Penerbit:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan :** H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifulhul Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Samarang :** Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Manajer Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Manajer Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Hariyadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.